



**TINJAUAN TERHADAP KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

TESIS

AGUS TIANSYAH

1320922083

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2016



**TINJAUAN TERHADAP KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

AGUS TIANSYAH

1320922083

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2016

PERNYATAAN ORISINALITAS

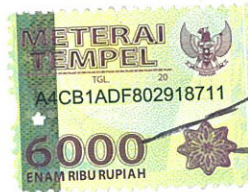
Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Agus Tiansyah
NRP : 1320922083
Tanggal : 17 Desember 2015

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 17 Desember 2015

Yang Menyatakan,



Agus Tiansyah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Tiansyah
NRP : 1320922083
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Tinjauan Terhadap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam
Perspektif Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Desember 2015

Yang menyatakan,



Agus Tiansyah

PENGESAHAN

Tesis ini diajukan Oleh :
Nama : Agus Tiansyah
NPM : 1320922083
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam
Perspektif Keputusan Presiden.**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



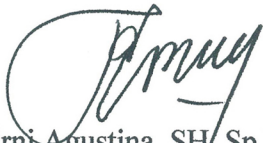
Prof. Dr. Wahyono Bhaskara, SH, MS

Ketua Penguji



Prof. Dr. Indrati Rini, SH, MS

Penguji Ahli



Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N

Penguji I/ Pembimbing



Dr. Arrisman, SH, MH

Penguji II/ Pembimbing



Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE, MM

Direktur



Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N

Ketua Program Studi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 18 Desember 2015

TINJAUAN TERHADAP KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

AGUS TIANSYAH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, mengetahui isi kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mengetahui cara penyelesaian perselisihan para pihak akibat tidak menunaikan prestasi yang disetujui dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara kesejahteraan dan teori hukum pembangunan, disamping teori perjanjian atau kontrak. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk kontrak yang terdapat dalam lalu lintas hubungan hukum dalam masyarakat, maka kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah juga melahirkan perikatan bagi pihak yang mengadakannya. Perikatan yang lahir dari kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakannya yaitu pemerintah/pemerintah daerah dengan badan usaha atau orang perseorangan lainnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *juridis normative*, yaitu penelitian hukum kepustakaan dan karena penelitian ini dilakukan dengan cara memiliki bahan kepustakaan.

Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa **prosedurnya** penyusunan kontrak Kepres RI No. 80 Tahun 2003 tidak mengaturnya. Kepres RI No. 80 Tahun 2003 tidak mencantumkan persyaratan harus memahami hukum-hukum perjanjian/kontrak bagi panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dalam Pasal 10 ayat (4) tentang persyaratan menjadi anggota panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah. Kepres RI No. 80 Tahun 2003 tidak mengatur siapa yang berwenang atau bertugas membuat konsep kontrak, sehingga dalam pelaksanaannya konsep kontrak disusun oleh panitia pengadaan barang/jasa pemerintah;

Saran yang diberikan adalah supaya ditambahkan ketentuan mengenai isi kontrak dalam Pasal 29 ayat (1) Kepres RI No.80 Tahun 2003 dengan menambahkan ketentuan bagian-bagian kontrak terdiri dari surat perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, dan dokumen lainnya yang terkait dengan kontrak;

Kata Kunci : barang/jasa pemerintah

REVIEW OF CONTRACT PROCUREMENT OF GOODS / SERVICES BY THE PERSPECTIVE OF PRESIDENTIAL DECREE NUMBER 80 OF 2003 ON GUIDELINES FOR THE PROCUREMENT OF GOODS / SERVICES GOVERNMENT

AGUS TIANSYAH

ABSTRACT

This study was conducted to determine the mechanism of contracting procurement of goods / services of the government, knowing the contents of the contract goods / services procurement of government, and to know how the dispute settlement the parties do not fulfill their due accomplishment agreed in the contract procurement of goods / services of the government. The theory used in this research is the theory of the welfare state and legal theory of development, in addition to the theory of agreement or contract. Contract procurement of government goods / services is one form of contract contained in the traffic law relationships in the community, then kontral procurement of government goods / services also bore engagement for those who hold it. Engagements born of contract goods / services procurement of government rights and obligations for the parties who hold it are government / local government and business entities or natural persons another. The method used is a normative juridical research. namely legal research literature and because the study was conducted in a way to have the literature.

Results of this study was formulated that the procedure of preparing the contract Presidential Decree No. 80 of 2003 does not regulate it. Presidential Decree No. 80 of 2003 does not specify requirements should understand the laws of agreement / contract for committee / official procurement of goods / services in Article 10 paragraph (4) of the requirements to become a member of the committee / procurement official government goods / services. Presidential Decree No. 80 of 2003 does not regulate who has the right or duty to make the concept of a contract, so in practice the concept of a contract drawn up by a committee of procurement of government goods / services;

The advice given is that added provisions regarding the contents of the contract in Article 29 paragraph (1) RI Presidential Decree 80 of 2003 by adding provisions portions contract consists of a letter of agreement, the general terms of the contract, specific terms of the contract, and documents more related to the contract;

Keywords: government goods / services

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan karuniaNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis **Tinjauan Tentang Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, ini dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Oleh karena itu, dengan rasa cinta dan hormat yang mendalam, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga, khususnya kepada seluruh pihak yang mendorong baik moril maupun material, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE.,MM selaku Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N, sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N selaku Pembimbing I
4. Dr. Arrisman, SH.,MH, selaku Pembimbing II
5. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada kami.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, bila ada kritik atau saran yang bersifat membangun keilmuan penulis, khususnya berkenaan dengan penyempurnaan tulisan ini, dengan senang hati penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Desember 2015

Penulis,



Agus Tiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	7
I.3 Tujuan Penelitian.....	7
I.4 Manfaat Penelitian.....	7
I.5 Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
I.6 Sistematika Penulisan.....	21
BAB II MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.....	23
II.1 Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	23
II.2 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	34
II.3 Isi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	49
II.4 Jenis-Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	51
II.5 Susunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	53
II.6 Proses Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.....	68
BAB III METODE PENELITIAN.....	74
III.1 Pendekatan Masalah.....	74
III.2 Sumber Data.....	74
III.3 Prosedur Pengumpulan Data.....	75
III.4 Teknik Analisa Data.....	76
BAB IV ANALISA HUKUM TERHADAP KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.....	77
IV.1 Analisa Terhadap Mekanisme Penyusunan Kontrak.....	77
IV.2 Analisa Terhadap Isi Kontrak.....	80
IV.3 Konsekuensi Yuridis Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	82
IV.4 Analisa Terhadap Penyelesaian Perselisihan.....	87
BAB V PENUTUP.....	97
V.1 Kesimpulan.....	97
V.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
RIWAYAT HIDUP	